



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
UNIT KERJA : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AMNASMEN
2. Jabatan : ANGGOTA
3. NHK : 741202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.725.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/275 m2 di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 106 m2/117 m2 di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
4. Tanah Seluas 432 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
5. Tanah Seluas 933 m2 di KAB / KOTA KOTA SOLOK , HASIL SENDIRI Rp. 325.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 381.000.000

1. MOBIL, INNOVA G Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SOLO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.250.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.214.075.648

F. HARTA LAINNYA Rp. 2.050.000.000

Sub Total Rp. 7.377.325.648

III. HUTANG Rp. 1.100.000.000

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

6.277.325.648

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.